RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TABALOG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan izin-Nya Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini adalah merupakan dokumen yang dijadikan pedoman bagi pelaksanaan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2024 dan rencana kerja ini juga mengacu pada rencana kerja pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, sehingga terdapat sinergitas dalam penyusunan program dan kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini.

Tanjung, 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
Kabupaten Tabalong,

ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780910 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			1
DAFTAR ISI			2
BAB I	PENDAHULUAN		3
	1.1.	Latar Belakang	5
	1.2.	Landasan Hukum	6
	1.3.	Maksud dan Tujuan	6
	1.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		8
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	15
	2.3.	Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	17
	2.4.	Review terhadap Rancangan Awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	26
	2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		35
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
	3.2.	Tujuan dan Sasaran	44
	3.3.	Program dan Kegiatan	44
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		46
BAB V	PENUTUP		53

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 pencapaian yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.

Gambar 1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja

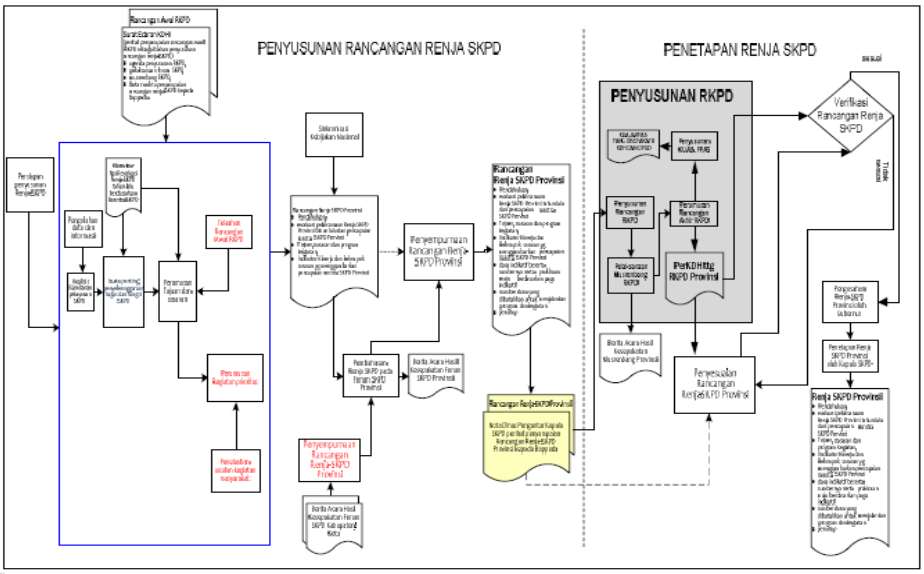

Sejalan dengan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong **"TERWUJUDNYA KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS, DINAMIS DAN AMAN SERTA KOKOHNYA PERSATUAN DAN KESATUAN DALAM BINGKAI NKRI"** dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Bidang Pemerintahan di Tahun 2022 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong yakni Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran RPJMD 2019 - 2024. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 atas Perubahan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati Tabalong Periode 2019 – 2024.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yaitu :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah – langkah / kebijakan tugas – tugas sesuai dengan kewenangannnya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sejak berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Analisa hanya dilakukan untuk Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah:

TABEL 2.1a
RENCANA DAN REALISASI INDIKATOR INPUT (ANGGARAN)
KEGIATAN BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2022

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.545.696.170**	**3.334.869.056.00**	**94,05%**
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.916.000	34,898.000.00	89,68%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.263.102.000	2.092.743.820.00	92,47%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.128.584	378.695.292.00	99,89%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.718.928	556.975.884.00	98,28%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.646.107	271.556.060.00	99,97%

B.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**190.472.260**	**151.319.517.00**	**79,44%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	190.472.260	151.319.517.00	79,44%
C.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**1.303.769.488**	**1.302.810.000.00**	**99,93%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.303.769.488	1.302.810.000.00	99,93%
D.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**504.049.200**	**468.188.000.00**	**99,61%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	504.049.200	468.188.000.00	99,61%
E.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**313.338.300**	**515.988.840.00**	**88,78%**
1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	313.338.300	515.988.840.00	88,78%
F.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**3.631.015.158**	**3.162.186.158.00**	**87,09%**

1.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.631.015.158	3.162.186.158.00	87,09%

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel 2.1b mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di tahun 2024 adalah :

TABEL 2.1b
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TABALONG S.D. TAHUN 2023 (TAHUN BERJALAN)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. tahun berjalan tahun 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	BELANJA TIDAK LANGSUNG									
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah	11 buah
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**									
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang

8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**									
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**									

8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**									
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**									
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	Masyarakat, 8 forum dan orang asing

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tabalong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Berikut tabel 2.2 mengenai capaian kinerja dan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN TABALONG

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2020)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik	%	70%	70%	74%	75%	78%	80%	80%
2. Persentase potensi konflik bernuansa SARA yang berhasil diselesaikan	%	70%	65%	70%	74%	75%	80%	80%
3. Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomian yang direkomendasikan	%	70%	65%	70%	74%	75%	80%	80%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Dalam rangka pelayanan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong mengacu pada peraturan Bupati No.41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesbangpol yang meliputi :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Di bawah Sekretariat ada 2 (dua) sub bagian, terdiri dari :
    a. Kepala Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan.
    b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
5. Di bawah Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama ada 2 (dua) sub bidang, terdiri dari :
    a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
    b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
7. Di bawah Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik ada 2 (dua) sub bidang, terdiri dari :
    a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
    b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik
8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasai Kemasyarakatan
9. Di bawah Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasai Kemasyarakatan ada 2 (dua) sub bidang, terdiri dari:
    a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri
    b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan

Sumber daya manusia tersebut belum mencukupi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pelayanan kinerja SKPD. Karena tingkat pelayanan masih kurang(Jumlah PNS dan Staf) semakin meningkat dengan tersedianya tenaga yang melayani keperluan karena tingkat pelayanan semakin tinggi, di perlukan tambahan tenaga PNS, atau NON PNS, untuk melayani keperluan masyarakat antara lain :

1. Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi
2. Memfasilitasi Pembuatan Surat Izin Pendirian Rumah Ibadah yang dikelola oleh FKUB Kabupaten Tabalong

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong

Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong yang selalu berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan juga situasi keamanan dan ketertiban setiap saat terus mengalami dinamika. Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini di Tabalong dapat di kemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, sebagai berikut : :

Program : Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan :

- Sosialisasi Kepada Pelajar atau Masyarakat tentang Ideologi bangsa Indonesia (Pancasila)
- Sosialisasi Kepada Pelajar Masyarakat terkait Bila Negara dan Pembinaan Kebangsaan yang mencakup sejarah Bangsa Indonesia dan Bineka Tunggal Ika.
- Pelaksanaan Tim Penembatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Permasalahan :

- Belum Mantapnya Kesadaran Ploralisme Dalam Kehidupan dan Bernegara yang Tunggal Ika Era Globalisasi Sekarang ini Sangat Berimbas pada kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara.

- Mulai lunturnya jati diri bangsa serta Ideologi Pancasila berakibat terjadinya Penurunan nilai-nilai kebangsaan dan Nasionalme.
- Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang Bhineka Tunggal Ika. Disamping itu Era Globalisasi sekarang ini sangat berimbas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mulai lunturnya jati diri bangsa serta Ideologi Pancasila berakibat terjadinya penurunan Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme;

Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik.

1. Pemantauan Politik Daerah, Untuk Mengetahui perkembangan situasi politik serta permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong terutama kaitannya dengan laporan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta masalah sosial lainnya, melalui peninjauan dan pengamatanlangsung serta permintaan data ke seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
2. Penyusunan Kepada Masyarakat, melakukan sosialisasi di bidang politik terhadap partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya dalam memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilihan umum presiden, pemilihan umum kepala daerah gubernur /wakil gubernur, pemilihan umum bupati/wakil bupati serta pemilihan umum anggota legislatif DPD-RI, DPR-RI, DPRD Prop/ Kab. Kepada seluruh elemen masyarakat masyarakat (lurah/kepala desa/aparat desa/kelurahan/BPD, PKK, tokoh-tokoh agama/masyarakat, unsur pemuda/karang taruna serta siswa-siswi smu sebagai pemilih pemula.
3. Verifikasi Kelengkapan Penagajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dalam proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik, dalam proses pencairan bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai kursi legislatif periode 2019-2024, melalui kegiatan bimbingan teknis pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

Permasalahan :

1. Pemantauan Politik Daerah, masih belum terkoordinasi dengan baik antara pihak kecamatan, Koramil, Polsek, SKPD tingkat kecamatan dan unsur kelurahan/desa serta tokoh-tokoh masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal melaporkan situasi dan kondisi wilayahnya terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat, serta masalah sosial lainnya, sehingga terkadang Pemerintah dianggap lambat dalam mengantisipasi dan menangani permasalahan yang terjadi.
2. Penyuluhan Kepada Masyarakat, masih banyaknya unsur elemen masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya dalam menggunakan hak politik baik hak memilih maupun hak pilih (khususnya partisipasi politik dalam memilih)dalam pelaksanaan pemilihan umum baik pemilu presiden / pemilu kepala daerah gubernur /wakil gubernur /pemilu bupati/wakil bupati serta pemilu anggota legislatif DPD-RI, DPR-RI,DPRD Prop/Kab.
3. Verifikasi kelengkapan pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada partai politik, belum optimalnya pemahaman dan kemampuan pengurus parpol dalam melaksanakan pertangung jawaban bantuan keuangan yang diterima oleh partai politik yang mempunyai kursi legislatif periode 2019-2024.

Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi.

1. Pertemuan ketua LSM dengan SKPD Kab. Tabalong, dalam meningkatkan peran serta dan kontribusi anggota LSM kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui pertemuan rutin dengan SKPD terkait terhadap permasalahan yang dihadapi atau lagi actual untuk dibahas serta menggali informasi hambatan dan tantangan serta program dan keiatan yang dilaksanakan SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya manusia serta menambah wawasan dan pengetahuan anggota terutama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara melalui kegiatan study implementasi ke daerah yang LSM nya sudah lebih maju dan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LSM.

Permasalahan :

1. Pertemuan anggota LSM dengan SKPD Kab. Tabalong, kurang Optimalnya kemampuan sumber daya manusia anggota LSM dalam mencermati permasaahan yang terjadi serta rencana kerja yang menyesuaikan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu berkaitan dengan masalah yang timbul sebagai dampak akibat adanya kebijakan /peraturan baru.
2. Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, kurang optimalnya kemampuan sumber daya manusia anggota LSM dan kesiapan waktu dari anggota LSM serta adanya kendala yang terjadi berkaitan dengan kegiatan study implementasi yang harus menyesuaikan dengan rencana kerja daerah yang dituju terkait dengan potensi permasalahan yang akan digali agar hasil yang didapat lebih maksimal.

Program : Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

Kegiatan : Deteksi Dini Potensi Konflik

- Untuk Mendeteksi dari segala kemungkinan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Kebedaan Tim atau Forom-forom ini sekurang-kurangnya dapat mendeteksi ruang gerak dalam aksi-aksi yang dapat memecah belahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- Membrikan saran dan pertimbangan kepada Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut dalam permasalahan yang dihadapi di daerah.
- Menghindari Konflik di Masyarakat dengan tetap memelihara keamanan dan ketertiban di masing-masing Wilayah.
- Mengadakan Pertemuan Minimal 1 kali dalam 1 bulan dan melaksanakan pemantauan kelapangan minimal 2 kali dalam setahun guna mendetiksi segala kemungkinan yang terjadi dimasyarakat.
- Menghindari terjadinya konflik antar suku, agama dan kelompok tertentu.
- Membantu pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

- Membuat Laporan hasil pertemuan dan hasil pemantauan kelapangan kepada Bupati sebagai bahan laporan kepada pemerintah dan tembusan disampaikan ke Gubernur Kalimantan selatan

Permasalahan :

- Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan untuk dapat tercapainya apa yang kita ingatkan.
- Perlu juga di dukung dengan Dana yang cukup agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang di inginkan.
- Koordinasi antara Instansi terkait dan juga koordinasi dengan Instansi pertikal yang ada di daerah ini.
- Kurangnya Monitor ke Kecamatan – Kecamatan sehingga potensi konflik yang mungkin terjadi di Kecamatan dan Desa, Informasinya terlambat kita terima.
- Kurangnya Pegawai Negeri yang bekerja di Bidang Kewaspadaan Nasional untuk menghandal pekerjaan – pekerjaan di bidang tersebut.

Program : Kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional

Kegiatan : Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing

- Untuk Mengetahui jumlah Orang Asing yang ada di Kabupaten Tabalong dan juga Tenaga kerja Asing yang bekerja di Perusahaan-perusahaan yang beroprasi di Kabupaten Tabalong.
- Disamping itu kita juga dapat memantau keberadaan dan kegiatan Lembaga Swadaya Asing / Organisasi Masyarakat Asing yang ada di Kabupaten Tabalong.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut keberadaan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
- Menghindari konflik antar Tenaga kerja Local dan Tenaga Kerja Asing.
- Mengadakan peretemuan Tim pemantauan minimal 1 kali dalam 1 bulan dan melaksanakan pemantauan turun kelapangan minimal 3 bulan sekalian
- Membuat laporan hasilpertemuan dan hasil pemantauan kelapangan kepada Bupati sebagai bahan Laporan kepada Pemerintah dan tembusan disampaikan ke Gubernur Kalimantan Selatan.

Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

Hambatan yang dihadapi dalam Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban ini adalah Keamanan dan Ketertiban dalam arti luas dimana beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya di Kabupaten Tabalong ini antara lain :

- Koordinasi antar instansi yang terkait belum maksimal sehingga menghambat dalam pelayanan publik.
- Belum maksimalnya tingkat pemahaman, inovasi, kreatifitas serta kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dari aparatur pelaksana.
- Kurangnya rasa tanggung jawab sebagai pemangku jabatan dalam koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi.
- Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
- Kurangnya sarana pendukung dalam pelaksanaan di lapangan maupun di kantor sehingga data yang dihasilkan tidak akurat.

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Tanggung Jawab yang diberikan kepada Daerah kepada SKPD, terkait langsung sector dalam Negeri, kecamatan dan ketertiban belum maksimal memeberikan kontribusi
2. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab dari Ormas terhadap kemajuan daerahnya melalui program pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, fasilitas partai politik, dan PEMILU akan sulit diciptakan.
2. Pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan untuk pengelolaan usaha mandiri belum terlaksana.
3. Memberikan kebebasan kepada kelompok masyarakat atau perorangan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan belum terwujud.
4. Kurangnya kualitas dan tanggung jawab masyarakat terhadap perkembangan daerahnya khususnya tentang wawasan kebangsaan.
5. Tidak terwujudnya pemerintahan yang baik dalam pengawasan langsung dengan jalan koordinasi, monitoring pemantauan di lapangan dan segala macam situasi yang berkembang di masyarakat.

6. Memberikan rasa aman kepada masyarakat dari segala kemungkinan yang terjadi yang dapat memecah belah terhadap kelompok dan masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TANTANGAN

1 Terjadinya perubahan Struktur Organisasi dengan perubahan Bidang yang menyebabkan perlu penyesuaian tugas dan fungsi.
2. Terjadinya persaingan antar aparatur serta ada kecendrungan mementingkan kegiatan program daripada pelaksanaan pelayanan rutin terhadap tugas dan fungsinya.
3. Terjadinya mutasi pejabat / pegawai yang berakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas karena yang bersangkutan harus belajar mulai awal.
4. Kurang kuatnya landasan hukum dari segala permasalahan yang dihadapi sehingga terhambatnya keputusan yang diambil dengan jalan koordinasi antar instansi.
5. Adanya tumpang tindih dalam pengambilan dan pemberian kebijakan sehingga menghambat penyelesaian permasalahan.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Kabupaten Tabalong terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.
7. Semakin maraknya kegiatan penyakit masyarakat dikarenakan banyaknya pendatang baru.
8. Malam maraknya Tumbuh hiburan Malam di Kabupaten Tabalong.

PELUANG

1. Tersedianya peraturan perundang – undangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Dukungan pemerintah daerah dalam Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Politik dalam Negeri Dalam Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
3. Kemajuan teknologi informasi.

KEKUATAN

1. Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan kegiatan.
2. Koordinasi yang baik antara Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. Personil pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan bertanggung jawab.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

KELEMAHAN

1. Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Kurangnya kualitas keterampilan pegawai, baik yang profesional secara teknik maupun operasional.
3. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal

5. Isu - Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Isu - Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dihadapi dalam Sektor Politik Dalam Negeri, Keamanan dan Ketertiban ini adalah Keamanan dan Ketertiban dalam arti luas dimana beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya di Kabupaten Tabalong ini antara lain :

- Peningkatan kerja sama dan keharmonisan hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat serta masyarakat itu sendiri.
- Peningkatan pengetahuan wawasan kebangsaan dari Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat serta masyarakat itu sendiri.
- Peningkatan keterampilan pengelolaan usaha mandiri oleh organisasi kemasyarakatan.
- Peningkatan peran serta Partai Politik dalam pembangunan daerah.

- Peningkatan fasilitas Pemerintah daerah terhadap pelaksanaan PEMILU.
- Terwujudnya kehidupan yang demokratis, dinamis, aman serta kokohnya persatuan dan kesatuan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang cinta NKRI.
- Menumbuhkembangkan situasi Kamtibmas yang stabil, aman, tertib dan damai untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan berwibawa.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019- 2024 adalah tahapan kesatu dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2005 - 2025. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019 - 2024 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas – bawah serta bawah-atas (*topdown – bottom up*).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong 2019 – 2024 untuk mengasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program

pembangunan yang terarah, efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Berikut tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Nama SKPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol)

NO	Rancangan Awal RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Tabalong			**5.628.492.701**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kab. Tabalong			**5.628.492.701**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah dokumen**	**11 buah**	**32.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah dokumen**	**11 buah**	**32.000.000**	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	32.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	32.000.000	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Gaji ASN terbayarkan**	**12 bulan**	**3.647.703.322**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Gaji ASN terbayarkan**	**12 bulan**	**3.589.143.322**	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong	Jumlah gaji ASN terbayarkan	14 bulan	3.647.703.322	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabalong	Jumlah gaji ASN terbayarkan	14 bulan	3.589.143.322	
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya bimbingan teknis**	**12 bulan**	**42.625.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya bimbingan teknis**	**12 bulan**	**101.185.000**	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tabalong	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	16 orang	22.625.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tabalong	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	16 orang	81.185.000	

.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tabalong	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35 orang	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tabalong	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35 orang	20.000.000	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**12 bulan**	**378.824.166**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran**	**12 bulan**	**364.783.386**	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan komponen instalasi listrik yang dibeli	12 bulan	2.046.875	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan komponen instalasi listrik yang dibeli	12 bulan	2.046.875	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 bulan	48.702.315	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 bulan	48.702.315	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabalong	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	44.529.786	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabalong	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	44.529.786	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	283.545.190	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	269.504.410	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah**	**20 unit**	**200.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah**	**20 unit**	**200.000.000**	

8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	20 unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	20 unit	200.000.000	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak**	**12 bulan**	**756.679.362**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak**	**12 bulan**	**770.720.142**	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen surat menyurat	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen surat menyurat	12 bulan	3.000.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabalong	Jumlah sumber daya air dan listrik terbayarkan	5 macam	68.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabalong	Jumlah sumber daya air dan listrik terbayarkan	5 macam	82.440.780	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan yang dibeli	12 bulan	58.900.882	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah alat dan perlengkapan yang dibeli	12 bulan	58.900.882	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah honorarium tenaga kontrak, makan minum terbayarkan	12 bulan	626.378.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabalong	Jumlah honorarium tenaga kontrak, makan minum terbayarkan	12 bulan	626.378.480	
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor**	**18 unit**	**570.660.851**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor**	**18 unit**	**570.660.851**	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	20 unit	245.090.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	20 unit	170.660.851	

8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan sara prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	325.570.851	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabalong	Jumlah pemeliharaan sara prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	400.000.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kab. Tabalong			**1.574.294.118**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kab. Tabalong			**1.639.619.118**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan**	**60 orang**	**1.574.294.118**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan**	**60 orang**	**1.639.619.118**	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tabalong	Jumlah kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	12 bulan	550.800.350	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Tabalong	Jumlah kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	12 bulan	1.639.619.118	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Kab. Tabalong			17.057.035						
	Pembentukan Paskibraka	Kab. Tabalong			1.006.436.733						

8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kab. Tabalong			**59.160.358.368**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kab. Tabalong			**59.160.358.368**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik**	**12 bulan**	**59.160.358.368**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik**	**12 bulan**	**59.160.358.368**	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah bantuan keuangan partai politik yang terverifikasi	10 parpol	58.142.293.500	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah bantuan keuangan partai politik yang terverifikasi	10 parpol	58.142.293.500	

8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan politik daerah terpenuhi	100 orang	1.018.064.868	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan politik daerah terpenuhi	100 orang	1.018.064.868	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**287.331.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**287.331.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas**	**12 bulan**	**287.331.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas**	**12 bulan**	**287.331.000**	
8.01.04.2.01.02	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan LSM dan Ormas	50 orang	287.331.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan LSM dan Ormas	50 orang	287.331.000	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kab. Tabalong**			**634.439.420**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Kab. Tabalong**			**569.114.420**	

8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi**	**12 bulan**	**634.439.420**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi**	**12 bulan**	**569.114.420**	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan agama	40 orang	174.721.500	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan agama	40 orang	174.721.500	
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan penyalahgunaan	12 bulan	459.717.920	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah peningkatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan penyalahgunaan	12 bulan	394.392.920	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kab. Tabalong**			**1.160.000.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Kab. Tabalong**			**1.160.000.000**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong**	**Masyarakat, 8 forum dan orang asing**	**1.160.000.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Kab. Tabalong**	**Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong**	**Masyarakat, 8 forum dan orang asing**	**1.160.000.000**	

8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan orang asing dan koordinasi tim kewaspadaan dini masyarakat terpenuhi	12 bulan	350.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pemantauan orang asing dan koordinasi tim kewaspadaan dini masyarakat terpenuhi	12 bulan	350.000.000	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	12 bulan	450.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pelaksanaan penanganan konflik sosial dengan forum-forum di Kabupaten Tabalong	12 bulan	450.000.000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	360.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	360.000.000	
JUMLAH					**68.444.915.607**	**JUMLAH**				**68.444.915.607**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 3.2
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Besaran / Volume	Catatan
1	2	4	3	4	5	9
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah dokumen	Kab. Tabalong	11 buah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Gaji ASN terbayarkan	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Terlaksananya bimbingan teknis	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabalong	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabalong	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tabalong	20 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabalong	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	Kab. Tabalong	12 bulan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabalong	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	Kab. Tabalong	18 unit	
2.	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Luar Kab. Tabalong	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan	Luar Kab. Tabalong	60 orang	
3.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Tabalong	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Kab. Tabalong	12 bulan	
4.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Tabalong	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	Kab. Tabalong	12 bulan	
5.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Tabalong	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	Kab. Tabalong	12 bulan	
6.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kab. Tabalong		Kab. Tabalong		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong		Masyarakat, 8 forum dan orang asing	

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Kegiatan melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Bangsa, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik.

Salah satu Instansi Pemerintah dalam wadah pembinaan terhadap masyarakat dalam menciptakan masyarakat yang tentram dan aman adalah pada Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang salah satunya Bidang Kesatuan Bangsa yang mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yakni Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dan Sub Bidang Penanganan Konflik.

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pada bidang ini mengusulkan peningkatan keharmonisan hubungan kemitraan Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan Organisasi Kemayarakatan dan Partai Politik yang mempunyai landasan kuat sehingga akan menciptakan iklim politik dan stabilitas keamanan di Kabupaten Tabalong yang semakin kondusif, aman, sejahtera dan bernuansa agamis melalui bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, yang mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yakni Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

Pada program ini mengusulkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya. Sehingga masyarakat Kabupaten Tabalong mempunyai ketahanan dari permasalahan di atas yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah yang ditampung dalam Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika,dan Sejarah Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, yang mempunyai 2 (dua) Sub Bidang yakni Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. adalah sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong berdiri sejak tahun 2003 dan berlokasi di Jalan Mawar Nomor 03 Tanjung Kode Pos 71513 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan demokrasi	Pendidikan politik dan etika budaya politik bagi masyarakat yang belum optima	Adanya Program Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan secara kontinyu kepada seluruh lapisan masyarakat
Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Perkembangan Globalisasi Budaya Luar ditengah masyarakat telah mendorong terjadinya perubahan pandangan yang sangat cepat dan sulit diprediksi sehingga melemahnya nilai budaya bangsa	Kegiatan pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat masih belum optimal	Adanya Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dilaksanakan secara kontinyu sebagai upaya peningkatan demokrasi masyarakat
Meningkatnya kewaspadaan nasional	Menurunnya wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan bela negara	Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Pembinaan kerukunan dan ketahanan melalui pembinaan organisasi kemasyarakatan dan	Potensi konflik Sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan teknologi informasi	Komitmen pemangku kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Sasaran	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	ketahanan dibidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi belum optimal		

Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan memiliki 13 (tiga belas) jabatan lainnya di bawah kepala serta memiliki tugas dan fungsi antara lain memberikan layanan Pengelolaan Kesekretariatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong memiliki harapan dimasa yang akan datang bisa lebih baik dalam memberikan layanan tentang Pengelolaan Kesekretariatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Oleh karenanya pengelolaan kesekretariatan, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama senantiasa berbenah untuk bisa menjadi lebih baik dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi yang antara lain adanya kinerja pegawai yang selama ini memang harus ditingkatkan karena adaya banyak faktor disentralisasi soal motivasi kerja lingkungan kerja dan gaya kepemimpinan. Adapun Struktur organisasi dan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.

Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur – unsur Organisasi Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas mengkoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik.

Untuk menjabarkan tugas di atas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan

perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur - unsur organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik adalah :

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanganan Konflik

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan hubungan dengan partai politik, lembaga politik dan lembaga legislatif serta pemberdayaan politik masyarakat.

Untuk menjabarkan tugas di atas Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur-unsur organisasi Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan adalah :

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik Dalam Negeri

b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Organisasi Kemasyarakatan

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Untuk menjabarkan tugas di atas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social dan budaya, fasilitasi

pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghaya kepercayaan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Unsur-unsur organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama adalah:

a. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
b. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

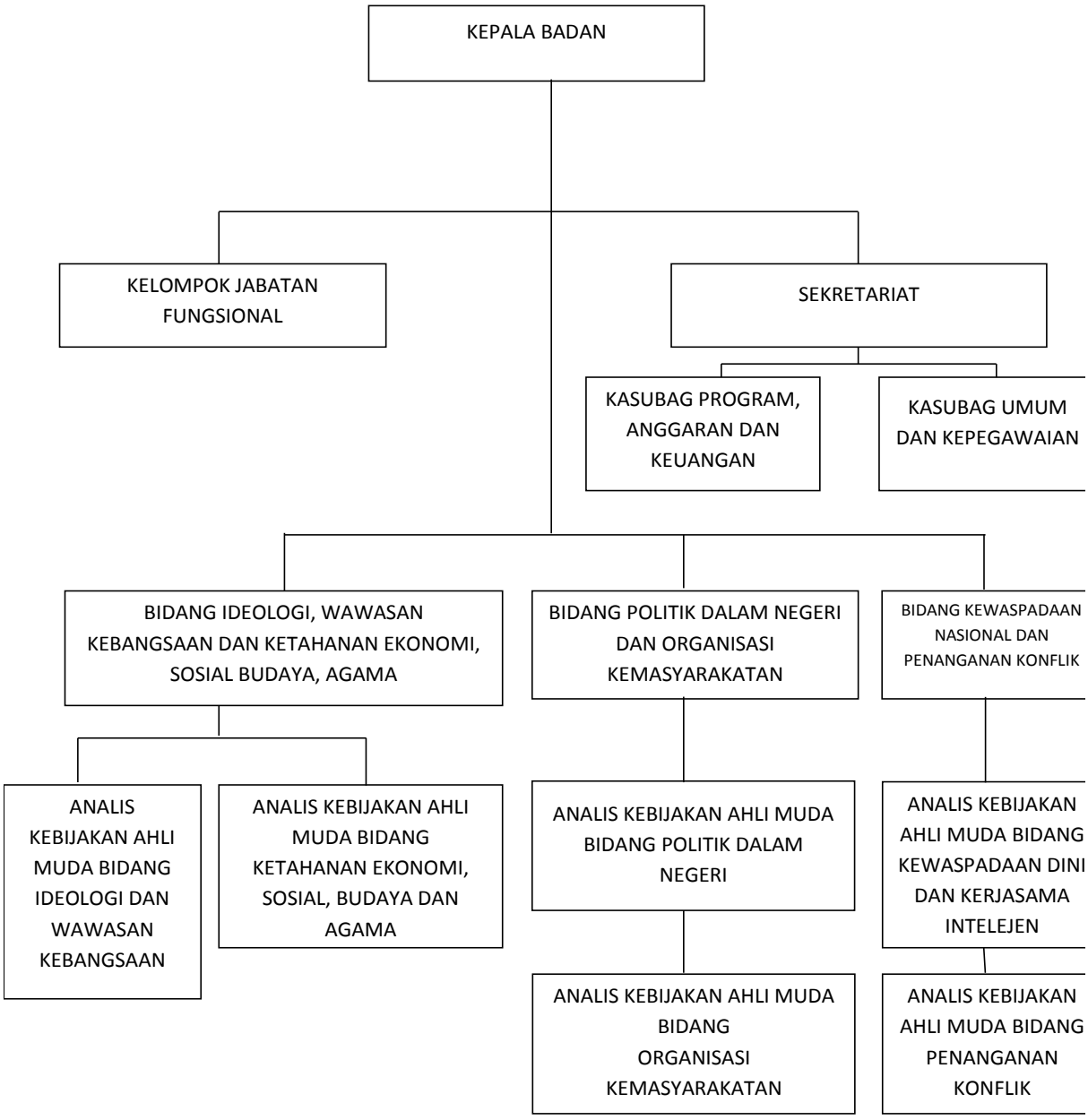
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
KASUBAG PROGRAM, ANGGARAN DAN KEUANGAN
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, AGAMA
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELEJEN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PENANGANAN KONFLIK

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis.
2. Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.2.2. Sasaran

1. Meningkatnya Pembinaan Politik dan Menumbuhkembangkan Kehidupan Demokratis.
2. Meningkatnya Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun ke - empat dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2019-2024.

Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (8.01.01), dengan kegiatan sebagai berikut :

A.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

A.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

A.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

A.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (8.01.02) dengan kegiatan sebagai berikut :

B.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

C. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK (8.01.03), dengan kegiatan sebagai berikut :

C.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

D. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (8.01.04) , dengan kegiatan sebagai berikut :

D.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA (8.01.05), dengan kegiatan sebagai berikut :

E.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (8.01.06), dengan kegiatan sebagai berikut :

F.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**7.454.024.281**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**122.169.000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.169.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.862.191.000**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.862.191.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**62.625.000**
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.625.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**825.051.660**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.546.875
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	241.105.999
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.529.786
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.869.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**121.742.908**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.742.908
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**860.139.362**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.400.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.360.882
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	669.378.480
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**600.105.351**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	270.855.351
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**2.070.086.118**
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	821.032.350

Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	17.057.035
Pembentukan Paskibraka	1.231.996.733
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**29.545.193.568**
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	28.447.529.700
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.097.663.868
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**760.171.000**
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	760.171.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**1.046.429.420**
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	538.799.500
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	507.629.920
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**8.875.664.000**
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	7.640.664.000

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	755.000.000
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota	480.000.000
JUMLAH	**49.751.568.387**

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024
Kabupaten Tabalong

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol)

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	URUSAN WAJIB									
1.05.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI									
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.454.024.281**					**5.628.492.701**
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Kab. Tabalong	11 buah	122.169.000	APBD	11 buah		11 buah	32.000.000
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji ASN terbayarkan	Kab. Tabalong	12 bulan	4.862.191.000	APBD	12 bulan		12 bulan	3.589.143.322
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis	Kab. Tabalong	12 bulan	62.625.000	APBD	12 bulan		12 bulan	101.185.000
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Kab. Tabalong	12 bulan	825.051.660	APBD	12 bulan		12 bulan	364.783.386

8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Tabalong	20 unit	121.742.908	APBD	20 unit		20 unit	200.000.000
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pembayaran telpon, sumber daya air, listrik, materai, honorarium tenaga kontrak	Kab. Tabalong	12 bulan	860.139.362	APBD	12 bulan		12 bulan	770.720.142
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor	Kab. Tabalong	18 unit	**600.105.351**		18 unit		18 unit	570.660.851
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**		**Kab. Tabalong**		**2.070.086.118**					**1.639.619.118**
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ideologi wawasan kebangsaan		60 orang	2.070.086.118		60 orang		60 orang	1.639.619.118

8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**		**Kab. Tabalong**		**29.545.193.568**	**APBD**				**59.160.358.368**
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya pemantauan politik daerah dan verifikasi bantuan keuangan partai politik	Kab. Tabalong	12 bulan	29.545.193.568	APBD	12 bulan		12 bulan	59.160.358.368

8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**		**Kab. Tabalong**		**760.171.000**	**APBD**				**287.331.000**
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya pembinaan LSM dan Ormas	Kab. Tabalong	12 bulan	760.171.000	APBD	12 bulan		12 bulan	287.331.000
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**		**Kab. Tabalong**		**1.046.429.420**	**APBD**				**569.114.420**
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan sosial budaya, dan ekonomi	Kab. Tabalong	12 bulan	1.046.429.420	APBD	12 bulan		12 bulan	569.114.420

8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**		**Kab. Tabalong**		**8.875.664.000**	**APBD**				**1.160.000.000**
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya penanganan konflik sosial dengan forum-forum di kabupaten tabalong	Kab. Tabalong	Masyarakat, 8 forum dan orang asing	8.875.664.000	APBD	Masyarakat, 8 forum dan orang asing		Masyarakat, 8 forum dan orang asing	**1.160.000.000**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong 2019 – 2024 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Tabalong serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang Pol) Kabupaten Tabalong Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tanjung, 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
Kabupaten Tabalong,

ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780910 199711 1 001